

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam dunia Islam. Menurut data dari *Global Religious Future*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai 209,12 juta jiwa alias 87% dari total populasi. Diperkirakan pada tahun 2020, penduduk beragama Islam di Indonesia akan mencapai 229,62 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 87% jumlah populasi, Partai Politik yang berlandaskan ideologi Islam pun banyak berdiri di Indonesia pada awal masa Reformasi.

Tercatat ada 9 partai berasaskan Islam, 2 partai yang berasaskan Pancasila & Aqidah Aswaja dan 1 Partai berasaskan Qur'an dan Hadist. Namun pada Pemilu 2019 lalu, tercatat hanya ada 5 Partai yang berasaskan Islam. Terlihat adanya penurunan jumlah partai Islam baru ini bisa berarti dua hal, partai Islam semakin solid karena mulai bersatunya umat Islam. Atau partai Islam semakin tidak menarik karena partai-partai baru yang berdiri akhir-akhir ini, semuanya berideologi nasionalis. Dalam Pemilu 2019 lalu, partai Islam tercatat mengalami kenaikan perolehan suara. Namun hanya 2 partai Islam yang mengalami kenaikan perolehan suara dibandingkan dengan Pemilu 2014 sebelumnya, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.<sup>2</sup>

Namun kenaikan suara kedua partai Islam ini dibandingkan pada Pemilu 2014 lalu tidak terlalu signifikan. Total perolehan suara lima partai Islam (PKB, PKS, PAN, PPP, dan PBB) pada Pemilu 2019 angkanya tidak berubah dari kisaran angka 30% total perolehan suara yang dicapai pada Pemilu 2014. Sentimen politik identitas agama yang terjadi pada Pilpres 2019

---

<sup>1</sup> Katadata, "Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia," last modified 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>.

<sup>2</sup> Kompas.com, "Perbandingan Suara Parpol 2014 Dan 2019: Dari Yang Melejit, Tersingkir, Hingga Yang Bertahan Jadi Juara," last modified 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all>.

lalu ternyata tidak memberikan dampak yang begitu signifikan pada perolehan hasil suara partai Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Perolehan suara partai Islam yang cenderung stagnan menunjukkan adanya masalah baik dalam internal maupun eksternal partai Islam. Permasalahan internal yang paling umum adalah hilangnya figur besar yang menjadi daya tarik utama sebuah partai Islam. Partai-partai nasional di Indonesia cenderung memiliki figur yang berkarisma dalam sosok ketua umum mereka. Karisma mereka mampu menarik massa untuk bergabung ke dalam Partai Nasional tersebut. PDI-P dengan trah Soekarno-nya dalam figur Megawati Soekarno Putri, Partai Gerindra dengan sosok Prabowo Subianto yang patriotik, Partai Demokrat dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono yang lembut namun tegas adalah contoh bagaimana Partai Nasionalis mampu memanfaatkan karisma figur politik untuk menarik perolehan suara.

Partai Islam juga pernah memiliki figur karismatik untuk menarik perolehan suara partai Islam. K.H. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan nama Gus Dur adalah salah satunya. Beliau begitu karismatik sehingga tidak hanya mampu menarik simpati umat Islam, namun juga warga non-muslim. Karenanya, Gus Dur diberi gelar Bapak Pluralisme Indonesia karena beliau mampu menyatukan umat muslim dengan umat beragama lainnya di Indonesia.<sup>4</sup>

Partai Islam di masa sekarang seperti kehilangan sosok figur karismatik dalam diri mereka. Para ketua umum partai Islam masa sekarang tidak cukup karismatik, bahkan malah cenderung kontroversial. Tercatat sudah ada 3 ketua umum partai Islam yang terjerat kasus korupsi. Terjeratnya ketua umum partai Islam ini menjadikan masyarakat hilang simpati terhadap partai Islam.<sup>5</sup>

Ketiadaan sosok figur dalam partai Islam yang karismanya cukup kuat saat ini, membuat partai-partai Islam saat ini menarik

---

<sup>3</sup> BBC Indonesia, "Pemilu 2019: Politik Identitas Dinilai Tidak Dongkrak Perolehan Suara Partai-Partai Islam," last modified 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47989598>.

<sup>4</sup> Suara.com, "Gus Dur, Bapak Pluralisme Indonesia," last modified 2014, <https://www.suara.com/news/2014/09/07/090005/gus-dur-bapak-pluralisme-indonesia>.

<sup>5</sup> Republika Online, "Partai Islam Korupsi, Publik Akan Menghakimi Dengan Kejam!," last modified 2013, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/02/mhl41g-partai-Islam-korupsi-publik-akan-menghakimi-dengan-kejam>.

simpati dengan melontarkan isu-isu strategis dan solusinya secara ideologis.<sup>6</sup> Namun hal ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh partai Islam. Bergantungnya partai nasional dengan sosok figur elit memang meningkatkan elektabilitas dalam pemilu, namun akan membuat partai sulit menanamkan ideologi parpol terhadap anggotanya. Akibatnya, ideologi partai politik di Indonesia terlihat samar, yang membuat pengambilan keputusan partai hanya sarat akan kepentingan meski itu bertentangan dengan ideologi partai.

Partai Islam yang menjadi perpanjangan tangan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah lebih mengedepankan aspek ideologis organisasi walau tidak sepenuhnya satu pandangan dengan ormas Islam mereka. Mereka masih bisa menarik simpati kader ormas Islam, walaupun tidak 100% kader ormas Islam akan masuk ke partai Islam yang menjadi perpanjangan tangan ormas Islam tersebut.<sup>7</sup> Tetapi ada juga partai Islam yang bukan merupakan perpanjangan tangan dari ormas Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera meskipun tidak memiliki figur elit yang karismatik di Partai-nya, namun Partai ini tetap solid dengan ideologi yang diusungnya. Namun akhir-akhir ini, partai Islam ini seakan goyah dengan konflik internal yang terjadi dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Sayangnya, Ideologi partai politik di Indonesia pasca reformasi menjadi samar dan tidak jelas. Partai politik di Indonesia gagal menyerap aspirasi masyarakat dengan basis ideologi partai. Ideologi partai tidak menjadi hal yang signifikan diperjuangkan. Menurut Marcus Mietzner, ideologi partai politik di Indonesia tidak lagi menjadi sesuatu yang signifikan. Partai dengan asas Islam dan nasionalis tidak lagi menghadapi pertentangan. Dalam banyak kesempatan, partai dengan ideologi Islam dan nasionalis justru bersatu membangun koalisi, baik dalam Pilkada ataupun koalisi di parlemen.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tempo, “Strategi Partai-Partai Islam Menembus Ambang Batas Parlemen,” last modified 2019, <https://pemilu.tempo.co/read/1182072/strategi-partai-partai-islam-menembus-ambang-batas-parlemen>.

<sup>7</sup> Ainur Rofieq, “Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) 2009,” *Governance (Jurnal Ilmu Pemerintahan)* 1, no. 2 (2011): 64–81, <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/711>.

<sup>8</sup> Marcus Mietzner, “Indonesia’s Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy?,” *Soeharto’s New Order*

Sejarah partai politik Islam di Indonesia sejak zaman kolonialisme Belanda memang penuh dengan konflik internal antar pengurusnya. Berdirinya Sarekat Islam (SI) yang menjadi wadah bagi umat Islam pada masa kolonialisme Belanda tidak luput dari terpaan konflik internal. Konflik internal yang menerpa SI adalah terbelahnya antar anggota menjadi pro komunis (disebut SI Merah) dengan non-komunis (disebut SI Putih). SI Merah akhirnya meninggalkan SI dan berhimpun menjadi Sarekat Rakyat yang pada perkembangannya menjadi inisiator berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah menjadi partai pun, PSII tidak luput dari terpaan konflik internal. Konflik internal terjadi ketika beberapa tokoh PSII dipecat seperti Sukiman dan Surjopranoto yang dianggap melakukan penghinaan terhadap HOS Cokroaminoto pemimpin PSII. Konflik PSII tidak berhenti di situ saja karena setelahnya PSII pecah menjadi tiga kelompok yakni kelompok kooperatif, non-kooperatif dan garis tengah. Konflik internal kembali terjadi ketika PSII memecat Kartosuwiryo yang ingin membawa PSII menjadi radikal dengan upaya pendirian Negara Islam Indonesia.

Setelah merdeka, keberadaan partai politik Islam di Indonesia secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga masa. Masa Orde Lama, masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, umat Islam dari berbagai golongan bersatu untuk membentuk partai Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam pada masa itu. Masyumi pun tak luput dari konflik internal. Pada tahun 1947, para tokoh PSII di Masyumi berbondong-bondong memisahkan diri dan mendirikan kembali PSII setelah sikap Masyumi terhadap dua tokoh PSII, yaitu Wendoamiseno dan Arudji Kartawinata yang tidak mendapat posisi strategis di Masyumi. Pada tanggal 5 April 1952 giliran petinggi NU yang keluar dari Masyumi. Keluarnya petinggi NU dari Masyumi karena adanya ketidakcocokan NU dengan gaya politik Masyumi. Alasan NU keluar pada saat itu karena NU yang dianggap representasi Islam tradisional dikesampingkan perannya dalam politik praktis Masyumi.

Partai politik Islam pada masa awal kemerdekaan selain mengalami konflik internal, mereka dihadapkan dengan intervensi pemerintah yang kemudian membatasi jumlah partai politik Islam dan membubarkan Masyumi karena diduga melakukan

---

*and Its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*, no. Aspinall 2005 (2010): 173–190.

pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Partai Islam lain yang dibiarkan hidup seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti membuat konflik internal partai-partai Islam mereda, namun kebijakan tersebut dianggap membatasi partai Islam dalam menyalurkan aspirasi Islam.

Pada masa Orde Baru, partai Islam juga tidak luput dari konflik internal meski tekanan dari pemerintahan Orde Baru yang membatasi berkembangnya partai Islam semakin kuat. Kebijakan Orde Baru yang mengurangi jumlah partai Islam membuat partai Islam yang tersisa di era Presiden Soekarno difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan fusi dari empat partai politik sangat rawan mengalami konflik antar pengurusnya pada saat itu. Konflik yang paling mencolok adalah benturan kelompok yang ada di PPP dengan tokoh-tokoh NU yang dominan di PPP. Menurut Syamsuddin Haris, pada era Orde Baru akhir 1970-an, internal PPP mengalami perbedaan yang memunculkan tiga kelompok dominan yang dibentuk oleh NU. Pertama, kelompok kiai yang dimotori antara lain KH. Ali Ma'shum. Kelompok ini menjaga karisma NU dalam PPP. Kedua, kelompok politisi garis keras yang dimotori Yusuf Hasyim, Saifuddin Zuhri dan Chalik Ali. Kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang gigih memperjuangkan kepentingan NU dalam PPP. Ketiga, kelompok politisi NU yang akomodatif seperti Idham Chalid, Masykur, Yahya Ubeid dan Chalid Mawardi. Kelompok ketiga ini dipandang sebagai kader dan politisi NU yang menerapkan politik praktis di PPP. Konflik internal PPP semakin mengerucut ketika kelompok ketiga (yaitu Idham Chalid) yang juga menjadi pengurus PBNU meminta PPP menolak RUU Pemilu, tapi di kesempatan lain Idham Chalid Bersama Jaelani Naro menghadiri rapat pleno dan menandatangani RUU tersebut.<sup>9</sup>

NU kemudian kembali *khittah* menjadi organisasi kemasyarakatan dan melepaskan diri dari PPP pada Mukhtamar NU ke-27 setelah Jaelani Naro berupaya menyingkirkan tokoh-tokoh NU dari PPP melalui pengurangan jatah kursi NU dalam daftar caleg PPP. Mundurnya NU membuat PPP terpuruk pada Pemilu 1987.

Sejak masa pra-kemerdekaan hingga Orde Baru, partai politik Islam tidak pernah luput dari konflik internal. Konflik

---

<sup>9</sup> Syamsuddin Haris, *PPP Dan Politik Orde Baru* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991). 86

tersebut mengakibatkan perpecahan dan berujung pada pembentukan partai baru yang memiliki ideologi dan basis massa yang sama yakni umat Islam sebagai pemilih. Konflik-konflik yang terjadi di partai Islam diakibatkan oleh perbedaan kepentingan elit partai.

Di era Reformasi, partai-partai baru bermunculan setelah presiden BJ. Habibie membuka ruang untuk mendirikan partai politik. Partai dengan berbagai ideologi pun berdiri termasuk partai Islam yang dikekang pada masa Orde Baru. Banyaknya partai Islam yang berdiri tidak mampu menyaingi perolehan partai nasionalis pada Pemilu 1999.

Partai Islam pasca reformasi pun tidak terlepas dari konflik internal. Konflik internal di tubuh partai Islam pasca reformasi umumnya adalah dualisme kepemimpinan. PKB, PPP dan PAN sebagai partai Islam terbesar di Indonesia tidak luput dari dualisme kepemimpinan. Partai Keadilan Sejahtera yang solid pun tidak luput dari konflik internal. Namun konflik yang terjadi tidak sampai menimbulkan dualisme kepemimpinan partai. Partai Gelora sebagai partai yang lahir dari konflik antar elit partai menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda.

Partai Gelora berdiri tanpa menggaungkan kalau mereka berasaskan Islam. Partai Gelora bercita-cita ingin mewakili seluruh kelompok dan elemen masyarakat di Indonesia dengan semangat kolaborasi.<sup>10</sup> Meski Partai Gelora didirikan oleh mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera, mereka sama sekali tidak menggaungkan Partai Gelora sebagai partai dakwah yang merupakan identitas Partai Keadilan Sejahtera dan lebih memilih untuk merangkul seluruh kelompok dan elemen masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera sendiri merupakan partai yang lahir melalui Gerakan dakwah dan tarbiyah. Gerakan ini lahir di masa Orde Baru ketika pemerintah membatasi partai politik. Muhammad Natsir yang merupakan mantan ketua Partai Masyumi pada waktu itu membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sebagai cara dalam berpolitik melalui dakwah karena presiden Soeharto tidak mengizinkan beliau aktif dalam politik.

Dakwah politik menjadi jalan lain untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam selain melalui partai politik

---

<sup>10</sup> Jawa Post News Network, "Anis Matta Beber 3 Ciri Pembeda Partai Gelora Dari PKS Dan Parpol Lain," last modified 2020, <https://www.jpnn.com/news/anis-matta-beber-3-ciri-pembeda-partai-gelora-dari-pks-dan-parpol-lain>.

Islam yang dibatasi menjadi hanya PPP pada masa Orde Baru. Dakwah politik ini menyasar ke lembaga-lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi. Semangat DDII kemudian diejawentahkan menjadi Lembaga Dakwah Kampus (LDK). LDK melalui gerakan yang cukup masif melalui masjid-masjid yang ada di berbagai kampus. Melalui gerakan dakwah dan tarbiyah tersebut Partai Keadilan lahir, tepatnya tanggal 30 Juli 1998. PK kemudian dideklarasikan pada tanggal 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Karena didirikan oleh aktivis dakwah, maka PK mengasosiasikan diri sebagai partai dakwah. Dalam perkembangannya, PK berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada tahun 2002.

Sebagai partai yang lahir pada masa reformasi, Partai Keadilan Sejahtera mengusung visi “terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat.” Untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan di Indonesia, bagi PKS tidak ada pilihan lain selain mewujudkan masyarakat madani. PKS menjadikan Piagam Madinah sebagai contoh konstitusi negara. Semangat Piagam Madinah adalah gotong royong, perdamaian, dan persaudaraan guna mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai visi tersebut, PKS telah menetapkan landasan dasar partai yang meliputi tiga bidang utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya.<sup>11</sup>

Partai Keadilan Sejahtera terlihat solid dari luar karena sangat jarang memperlihatkan konflik yang terjadi di internalnya. Hal itu juga berlaku dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus sendiri adalah kota yang menarik karena budaya toleransi antar umat beragama yang terjalin dengan sangat baik. Sebagai partai Islam, Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kudus aktif memperjuangkan Perda Syariah di Kabupaten Kudus, serta menolak adanya Perda yang dinilai berpotensi dapat merusak moral bangsa. Namun hal itu tetap pada koridor-koridor yang normal, dan tidak sampai menyinggung umat beragama lain di Kabupaten Kudus.

Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kudus bukan merupakan partai dengan perolehan suara terbanyak, namun perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Kudus cukup stabil. Sebagai partai Islam di kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Partai Keadilan Sejahtera cukup

---

<sup>11</sup> Adi Prayitno M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra, *Prahara Partai Islam Komparasi Konflik Internal PPP Dan PKS* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019) hal. 116

dipercaya masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal ini terbukti dengan perolehan 4 kursi dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 lalu. Masyarakat Kabupaten Kudus sendiri yang mayoritas beragama Islam tidak membuat partai Islam dipercaya sepenuhnya. Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, partai dengan perolehan kursi anggota DPRD terbanyak di Kabupaten Kudus bukan merupakan partai Islam.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus yang terlihat solid dari luar membuat penulis ingin mengetahui apakah konflik juga terjadi di dalam partai yang terlihat solid dari luar ini, khususnya setelah konflik yang mendera kepengurusan pusat Partai Keadilan Sejahtera. Konflik internal di kepengurusan pusat ini berdampak pada dicopotnya Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah, Kamal Fauzi, yang merupakan orang Kudus.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian kualitatif berfokus pada beberapa aspek, diantaranya adalah aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang saling bersinergi. Dari argument tersebut dapat ditarik adanya batasan fokus penelitian agar penelitian lebih terarah. Penulis akan membatasi masalah yang bertempat di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus, dengan subyek penelitian adalah para pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus yang dalam hal ini berfokus pada bentuk-bentuk konflik yang dialami oleh pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus periode sekarang serta cara pengurus partai memajemen konflik yang terjadi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk konflik yang terjadi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana cara pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus memajemeni konflik yang terjadi di internal partai?



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana partai Islam tepatnya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus menghadapi konflik-konflik yang terjadi di internalnya.
2. Mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi di dalam Partai Keadilan Sejahtera serta cara pengurus partai memajemen konflik yang dialami oleh partai.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian serta mereka yang berminat dengan studi partai Islam, yaitu:

##### **1. Segi Teoritis**

Secara teknis, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam mewacanakan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai konflik yang dapat terjadi di internal partai Islam manapun, bahkan yang terlihat solid di luarnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat Partai Politik Islam dengan mengetahui bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mampu menghadapi konflik dalam internal partai mereka.

##### **2. Segi Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi partai Islam untuk intropeksi agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat dan tidak muncul hanya sebagai kendaraan politik saja.
- b. Memperkuat sistem kaderisasi agar partai Islam tetap kuat dalam perjuangannya mengusung ideologi politiknya.
- c. Menjadi sumber inspirasi untuk mereka yang membutuhkannya, terutama bagi mereka yang tengah melakukan penelitian agar dapat mempermudah serta memperlancarkan analisis mereka.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar penelitian bisa tersusun secara sistematis dan ilmiah. Sistematika penulisan diperlukan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dalam setiap bagian atau yang saling berhubungan dalam penelitian. Berikut ini sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi uraian konsep serta definisi yang terkait dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian partai politik, ideologi dan daya tarik partai politik.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan mengenai bagaimana Partai Keadilan Sejahtera menghadapi konflik yang terjadi di internal partai melalui manajemen konflik di tingkat kepengurusan daerah. Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai referensi untuk partai politik di Indonesia yang sering sekali menghadapi konflik di internal partainya.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.